



Pengaruh PDRB, kemiskinan, pengangguran, dan PMA terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Yana Fitria* & Ruth Eviana Hutabarat^{ID}

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Gross Regional Domestic Product at Constant Prices (GRDP), the number of poor people, the open unemployment rate, and foreign direct investment (FDI) on income inequality across regencies and municipalities in the Special Region of Yogyakarta. The study employs a quantitative approach using panel data covering five regencies/municipalities during the 2015–2024 period. Data were analyzed using panel data regression with the assistance of EViews 12 software. The findings reveal that the open unemployment rate has a positive and significant effect on income inequality, whereas foreign direct investment has a negative and significant effect. In contrast, GRDP and the number of poor people have no significant effect on income inequality. These findings indicate that income inequality in the Special Region of Yogyakarta is more strongly influenced by labor market conditions and the distribution of investment than by economic growth and aggregate poverty levels. The results of this study are expected to provide insights for local governments to formulate more inclusive development policies by expanding employment opportunities and more equitably distributing investment to reduce regional income inequality.

Keywords: *Income Inequality, GRDP, Poverty, Open Unemployment Rate, Foreign Investment.*

Article Information:

Received 4/15/2026 / Revised 5/17/2026 / Accepted 5/30/2026 / Online First 6/15/2026

Corresponding author:

Yana Fitria. Email: yana.22096@mhs.unesa.ac.id



© The Author(s) 2026. Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The terms on which this article has been published allow the posting of the Accepted Manuscript in a repository by the author(s) or with their consent.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup lima kabupaten/kota selama periode 2015–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, PDRB ADHK dan jumlah penduduk miskin (JPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja dan distribusi investasi dibandingkan oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan secara agregat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif melalui perluasan kesempatan kerja dan pemerataan investasi guna mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, Investasi Asing.

1. Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional dan masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan mencerminkan adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesempatan kerja, dan modal sehingga berpotensi memengaruhi kesejahteraan sosial dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Janah, 2022). Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya ketimpangan pendapatan dapat menghambat pemerataan hasil pembangunan serta memperlebar kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah (Sugiarti & Erdkhadifa, 2023).

Tingkat ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan rasio gini (*gini ratio*), yaitu indikator yang menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah (Wildman, 2021). Nilai rasio gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi (Hartati, 2022). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang secara konsisten memiliki tingkat ketimpangan pendapatan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun dikenal sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio gini DIY selama satu dekade terakhir cenderung berada di atas rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2025).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio gini DIY tercatat sebesar 0,459 pada tahun 2022 dan menurun menjadi 0,428 pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren penurunan, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di DIY juga menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai pusat aktivitas ekonomi memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata di seluruh wilayah DIY. Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tinggi berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan,

layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang produktif sehingga menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif (Todaro & Smith, 2020).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi yang diproses menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Peningkatan PDRB mencerminkan bertambahnya aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi suatu wilayah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami peningkatan PDRB ADHK selama periode 2015–2024. Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu memberikan manfaat yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin (JPM) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga diduga berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan. Tingginya jumlah penduduk miskin mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan peluang memperoleh pendapatan yang layak. Sementara itu, tingginya tingkat pengangguran menunjukkan belum optimalnya kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Kedua kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan karena sebagian masyarakat memiliki akses yang lebih terbatas terhadap aktivitas ekonomi produktif (Todaro & Smith, 2020). Penelitian Sugiarti dan Erdkhadifa (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat ketimpangan pendapatan di berbagai wilayah Indonesia.

Faktor lain yang turut diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi asing berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas. Akan tetapi, apabila investasi terkonsentrasi pada wilayah tertentu, manfaat ekonomi yang dihasilkan berpotensi tidak terdistribusi secara merata sehingga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antarwilayah. Rusu dan Oprean-Stan (2025) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan akses terhadap peluang ekonomi berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih menguji pengaruh variabel ekonomi secara parsial. Kajian yang mengintegrasikan PDRB ADHK, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan penanaman modal asing dalam satu model empiris pada tingkat kabupaten/kota masih relatif terbatas, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, karakteristik ekonomi masing-masing kabupaten/kota di DIY yang berbeda memungkinkan adanya variasi pengaruh dari setiap variabel terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pada tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB ADHK, jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur mengenai ketimpangan pendapatan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-10 yang berfokus pada pengurangan ketimpangan.

2. Landasan Teori dan Hipotesis

Teori Kuznets

Konsep yang dipopulerkan Kuznets (1955) menyatakan bahwa pada tahap permulaan transformasi perekonomian, kenaikan output ekonomi mendorong meningkatnya ketimpangan pendapatan, dampak dari perbedaan produktivitas dan penghasilan antar sektor ekonomi. Perbedaan tingkat perkembangan di berbagai sektor ekonomi serta ketidakmerataan akses terhadap modal dan peluang kerja ini menyebabkan pendapatan tidak terdistribusi dengan rata. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ekonomi terus berkembang dan kesempatan ekonomi semakin merata. Pada fase ini, ketimpangan pendapatan akan semakin berkurang sejalan dengan berkembangnya pemerataan akses pendidikan, investasi, dan kesempatan ekonomi.

Teori Dualisme Ekonomi

Teori dualisme yang dikemukakan oleh (Lewis, 1954) menyatakan bahwa negara berkembang memiliki sistem ekonomi yang terdiri dari sektor tradisional dengan tingkat produktivitas dan upah rendah serta sektor modern dengan produktivitas dan upah yang lebih tinggi. Kesenjangan kemajuan dan perkembangan lintas sektor ini membuat akses masyarakat terhadap peluang ekonomi menjadi tidak merata. Dalam situasi ini, kemiskinan terjadi karena sebagian masyarakat masih terjebak dalam sektor tradisional dengan upah yang minim. TPT menunjukkan kurang optimalnya sektor modern dalam menyerap pekerja dari sektor tradisional. Di samping itu, penanaman Modal Asing (PMA) sebagai sumber pendanaan pembangunan cenderung berfokus pada sektor modern dan padat modal, sehingga keuntungan investasi berpotensi hanya dirasakan oleh segelintir orang. Kondisi tersebut berpotensi memicu peningkatan kesenjangan pendapatan.

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diprosikan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Menurut Badan Pusat Statistik (2025), PDRB riil dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di suatu daerah mengalami perkembangan. Namun, apabila manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, peningkatan PDRB berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Rahmadi *et al.* (2024) menemukan bahwa peningkatan PDRB ADHK berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan di wilayah Pulau Sumatera. Sebaliknya, Ghifara *et al.* (2022) menunjukkan bahwa PDRB ADHK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada lima kota metropolitan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: PDRB ADHK berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan

Hubungan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Jumlah penduduk miskin mencerminkan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi serta kesempatan kerja yang produktif. Dalam perspektif teori dualisme ekonomi, kondisi tersebut terjadi karena sebagian masyarakat masih terjebak pada sektor tradisional yang memiliki tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat berpotensi semakin melebar. Hasil penelitian Kunengan *et al.* (2023) dan Sari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, Andina *et al.* (2021) menemukan bahwa jumlah

penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan

Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

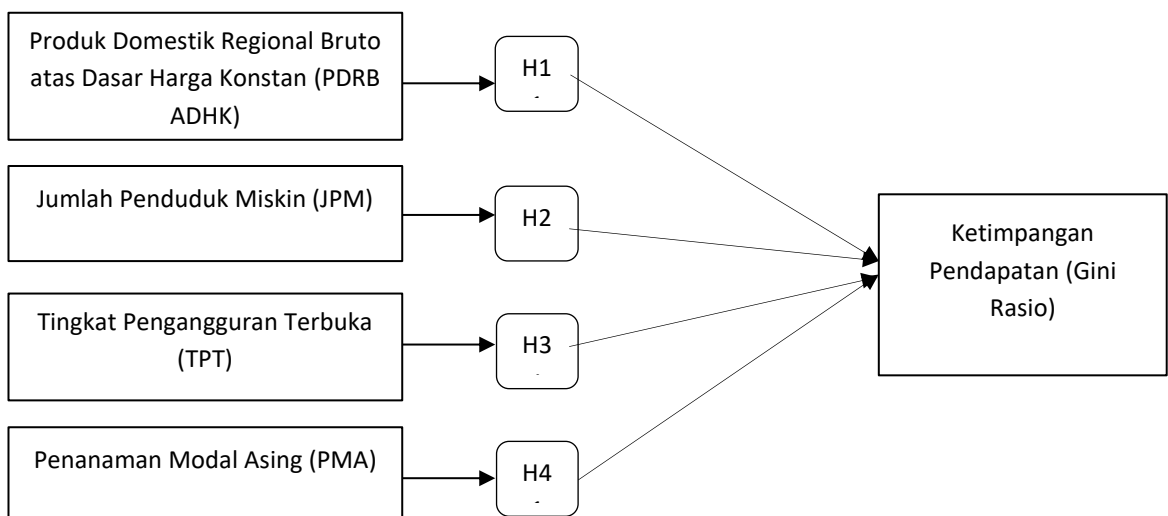
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Dalam teori dualisme ekonomi, tingginya tingkat pengangguran menunjukkan belum optimalnya kemampuan sektor modern dalam menyerap tenaga kerja, sehingga sebagian masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan yang layak. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Mahdi dan Sulistyono (2023) menemukan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Madura. Sebaliknya, Ersad *et al.* (2020) menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Irawan *et al.* (2024) menemukan bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu sumber investasi yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, menurut teori dualisme ekonomi, investasi yang terkonsentrasi pada sektor modern dan padat modal cenderung memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok masyarakat tertentu sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan. Baskoro *et al.* (2024) menemukan bahwa PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sebaliknya, Wijayanti dan Aisyah (2022) menunjukkan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara PMA dan ketimpangan pendapatan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode

Sampel dan Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif-asosiatif untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta instansi terkait. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data penampang (*cross section*) (Gujarati & Porter, 2009). Unit analisis terdiri atas lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, dengan periode pengamatan tahun 2015–2024. Maka dari itu, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 observasi yang diperoleh dari 5 unit *cross section* dan 10 periode *time series*. Mengingat seluruh anggota populasi digunakan sebagai objek penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh (saturated sampling)* (Sugiyono, 2013).

Pengukuran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diprosikan menggunakan rasio gini (*gini ratio*), yaitu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah (Irawan *et al.*, 2024). Variabel independen terdiri atas PDRB ADHK, jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA). PDRB ADHK digunakan sebagai proksi pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan nilai output riil suatu wilayah dan diukur dalam satuan miliar rupiah (Ghifara *et al.*, 2022). Jumlah penduduk miskin diukur berdasarkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dan dinyatakan dalam ribuan jiwa (Kunengan *et al.*, 2023). Tingkat pengangguran terbuka diukur berdasarkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja (Widyastuti & Indrawati, 2021). Sementara itu, PMA diukur berdasarkan nilai realisasi investasi asing yang masuk ke masing-masing kabupaten/kota dan dinyatakan dalam satuan miliar rupiah (Baskoro *et al.*, 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Tahap awal analisis dilakukan dengan menentukan model regresi data panel yang paling sesuai melalui pengujian *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (Gujarati & Porter, 2009). Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan. Uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji kelayakan model secara keseluruhan, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil statistik deskriptif untuk variabel ketimpangan pendapatan (gini rasio), Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
Gini rasio	50	0.398600	0.044667	0.316000	0.519000
PDRB ADHK	50	20609.32	9877.584	6281.900	41559.54
JPM	50	95.47060	39.75523	28.79000	160.1500
TPT	50	3.785000	1.769491	1.490000	9.160000
PMA	50	1355.733	1540.794	22.00000	4504.250

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel penelitian memiliki jumlah observasi sebanyak 50 yang berasal dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015–2024. Variabel ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3986 dengan nilai minimum 0,3160 dan maksimum 0,5190. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode penelitian berada pada kategori sedang hingga relatif tinggi. Selain itu, standar deviasi sebesar 0,0447 mengindikasikan bahwa variasi ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antarperiode pengamatan relatif rendah.

Variabel PDRB ADHK memiliki nilai rata-rata sebesar Rp20.609,32 miliar dengan nilai minimum Rp6.281,90 miliar dan maksimum Rp41.559,54 miliar. Perbedaan yang cukup besar antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan adanya variasi tingkat aktivitas ekonomi antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, jumlah penduduk miskin memiliki rata-rata sebesar 95,47 ribu jiwa dengan rentang nilai antara 28,79 ribu jiwa hingga 160,15 ribu jiwa, yang menunjukkan masih adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,79 persen dengan nilai minimum 1,49 persen dan maksimum 9,16 persen. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami variasi selama periode pengamatan. Adapun variabel penanaman modal asing (PMA) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp1.355,73 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp1.540,79 miliar. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa realisasi PMA cenderung berfluktuasi dan tidak terdistribusi secara merata antarwilayah maupun antarperiode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya konsentrasi investasi asing pada daerah-daerah tertentu yang memiliki daya tarik investasi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Setelah model Fixed Effect Model (FEM) ditetapkan sebagai model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi regresi data panel untuk menguji pengaruh PDRB ADHK, jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan FEM disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	β	SE	P-value
PDRB ADHK	-0.000121	0.000154	0.4373
JPM	-0.000849	0.000476	0.0818
TPT	0.010332	0.003595	0.0064
PMA	-0.000106	0.000363	0.0057
<hr/>			
R ² Square	0,83789		
F-Statistics / p-value	26,49014 (0,000)		

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada taraf signifikansi 5%, variabel PDRB ADHK memiliki koefisien sebesar -0,000121 dengan nilai probabilitas 0,4373. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga PDRB ADHK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diprosikan dengan rasio gini. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak. Variabel jumlah penduduk miskin (JPM) juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0818 yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki koefisien positif sebesar 0,010332 dengan nilai probabilitas 0,0064 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Sementara itu, variabel penanaman modal asing (PMA) memiliki koefisien negatif sebesar -0,000106 dengan nilai probabilitas 0,0057. Hasil ini menunjukkan bahwa PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F-statistic sebesar 26,49014 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian layak digunakan dan secara simultan variabel PDRB ADHK, jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,83789 menunjukkan bahwa 83,79% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB ADHK, JPM, TPT, dan PMA yang digunakan dalam model penelitian. Sementara itu, sebesar 16,21% variasi ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB ADHK memiliki koefisien negatif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin dari kenaikan PDRB belum mampu memengaruhi perubahan distribusi pendapatan secara nyata. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah.

Temuan tersebut sejalan dengan hipotesis Kuznets (1955) yang menjelaskan bahwa pada tahap tertentu proses pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada sektor jasa, pendidikan, pariwisata, dan perdagangan yang berkembang pesat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sementara sebagian wilayah lainnya masih didominasi oleh sektor primer dengan tingkat produktivitas yang relatif lebih rendah.

Kondisi tersebut menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata sehingga peningkatan PDRB belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tingkat ketimpangan pendapatan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Mangundap *et al.* (2024) yang menemukan bahwa PDRB ADHK memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Kemiskinan menggambarkan kondisi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan ketimpangan pendapatan mencerminkan distribusi pendapatan antarindividu atau kelompok masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi belum tentu memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi apabila sebagian besar penduduk berada pada tingkat pendapatan yang relatif homogen.

Kondisi tersebut dapat ditemukan pada beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif seragam. Temuan ini mendukung teori dualisme ekonomi yang dikemukakan Lewis (1954), yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan lebih dipengaruhi oleh perbedaan produktivitas dan tingkat pendapatan antara sektor tradisional dan sektor modern dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin itu sendiri. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Andina *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran akan mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan. Secara ekonomi, pengangguran mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja sehingga sebagian masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang layak. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok yang memiliki pekerjaan dan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan menjadi semakin besar.

Temuan ini sejalan dengan teori dualisme ekonomi Lewis (1954) yang menjelaskan bahwa ketimpangan dapat muncul ketika sektor modern belum mampu menyerap surplus tenaga kerja dari sektor tradisional secara optimal. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan sektor jasa, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu sehingga tidak seluruh angkatan kerja mampu berpartisipasi dalam sektor tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian tenaga kerja tetap berada pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Mahdi dan Sulistyono (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi asing berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Masuknya investasi asing berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan.

Karakteristik perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang didominasi oleh sektor pariwisata, perhotelan, jasa, dan industri kreatif memungkinkan investasi asing memberikan dampak yang relatif luas terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari perspektif teori dualisme ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor modern yang didukung oleh investasi mampu menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional sehingga mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata (Lewis, 1954).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas investasi menjadi faktor penting dalam menentukan dampak PMA terhadap pemerataan pendapatan. Investasi yang memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi lokal dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja cenderung memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Baskoro *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PDRB ADHK, jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015–2024. Hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, PDRB ADHK dan JPM tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dinamika ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja dan distribusi investasi dibandingkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemiskinan secara agregat. Dengan demikian, upaya pengurangan ketimpangan pendapatan tidak hanya memerlukan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga perlu didukung oleh perluasan kesempatan kerja dan investasi yang mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata antarwilayah.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan sektor-sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kebijakan investasi perlu diarahkan pada sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dan keterkaitan yang kuat dengan perekonomian lokal sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pemerataan pendapatan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel yang digunakan masih terbatas pada indikator makroekonomi sehingga belum mampu mengakomodasi faktor lain yang berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, struktur ekonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur. Kedua, periode

pengamatan yang digunakan relatif terbatas pada rentang 2015–2024 sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan memasukkan aspek sosial dan kelembagaan, menggunakan periode observasi yang lebih panjang, serta mempertimbangkan pendekatan analisis yang lebih komprehensif, seperti regresi panel spasial atau model nonlinier, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Referensi

- Andina, R. D., Jajang, & Supriyanto, S. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika (JMP)*, 13(1), 1–14.
- Baskoro, H. A., Santoso, D. B., & Pangesty, W. F. (2024). Determinants of income inequality in Indonesia. *International Conference On Social Scane*, 3. <https://doi.org/10.59188/icss.v3i2.209>
- BPS-Statistics Indonesia. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2020-2024* (E. Tasriah, E. Riawati, & Yunofri, Eds.; Vol. 18). Badan Pusat Statistik.
- Ersad, M., Amir, A., & Zulhani. (2020). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera bagian selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 2684–7868.
- Ghifara, A. S., Wardhana, A. K., Iman, A. N., Rusgianto, S., & Ratnasari, R. T. (2022). The effect of economic growth, government spending, and human development index toward inequality of income distribution in the metropolitan cities in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 529–536. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1092>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). Douglas Reiner.
- Hartati, Y. S. (2022). Analisis ketimpangan ekonomi di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116>
- Irawan, D., Wijimulawiani, B. S., & Hak, M. B. (2024). Analisis pengaruh populasi, pertumbuhan ekonomi, ipm, investasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 - 2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(3), 623–633. <https://doi.org/10.36985/y23kbn87>
- Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia, dan investasi asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 143–155. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183>
- Kunengan, R. M. A., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan lima kabupaten/kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23.
- Kuznets, S. (1955). *Economic Growth And Income Inequality: XLV*.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139-191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Mahdi, I., & Sulistyono, S. W. (2023). Determinants of gini ratio: a case study of low gini ratio in Madura. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 245–260. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i2.1119>
- Mangundap, V. H., Kumenaung, A. G., & Siwu, H. F. D. (2024). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24.
- Rahmadi, S., Siregar, R., & Rosmeli. (2024). Determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatra. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(4), 2085–1960.

- Rusu, R., & Oprean-Stan, C. (2025). *The impact of digitalisation and sustainability on inclusiveness: Inclusive growth determinants*. arXiv preprint arXiv:2501.07880. <https://arxiv.org/abs/2501.07880>
- Sari, Y., Soleh, A., & Wafiaziza, W. (2021). Analisis pengaruh pendidikan dan penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(2), 169–180. <https://doi.org/10.53978/jd.v9i2.182>
- Sugianti, I., & Erdkhadifa, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tahun 2021. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2427–2441. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3498>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson Education.
- Widyastuti, & Indrawati, L. R. (2021). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 95–104. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i2.268>
- Wijayanti, E. S., & Aisyah, S. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi asing, inflasi, dan trade openness terhadap ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 534. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.606>
- Wildman, J. (2021). COVID-19 and income inequality in oecd countries. *European Journal of Health Economics*, 22(3), 455–462. <https://doi.org/10.1007/s10198-021-01266-4>

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Publisher's Note

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta (STEI Press) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations

Rights and permissions

Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.